

**PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK
DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELAMA
OTONOMI DAERAH**

Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh :

RAFAEL DITYA UGRASENA

(012114091)

**FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2007

**PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELAMA OTONOMI
DAERAH**

Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh :

Nama : Rafael Ditya Ugrasena

NIM : 012114091

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2007

SKRIPSI

**PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELAMA OTONOMI DAERAH
Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta**

Oleh :

Nama : Rafael Ditya Ugrasena

NIM : 012114091

Telah Disetujui Oleh :

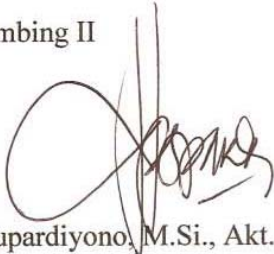
Pembimbing I



Firma Sulistiyowati, SE., M.Si.

Tanggal 14 / 11 / 2007

Pembimbing II



Drs. Supardiyono, M.Si., Akt.

Tanggal 15 / 11 / 2007

SKRIPSI
**PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELAMA OTONOMI DAERAH**
Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Rafael Ditya Ugrasena
012114091

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 20 November 2007
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

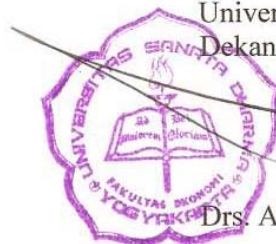
Nama Lengkap


Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Sekretaris	Lisia Apriani., S.E., M.Si., Akt.
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.
Anggota	Drs. Supardiyono, M.Si., Akt.
Anggota	Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt.

Tanda tangan



Yogyakarta, 30 November 2007
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan,



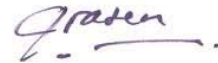

Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan atau daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 08 Juni 2007

Penulis



Rafael Ditya Ugrasena

ABSTRAK

Perbandingan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Selama Otonomi Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

**Oleh:
Rafael Ditya Ugrasena
012114091
Universitas Sanata Dharma
2007**

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan Pajak daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta selama otonomi daerah, 2) Untuk membandingkan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah pada setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 dari setiap Pemerintah Kabupaten/Kota. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis rasio efektivitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman berkisar 108,37% sampai dengan 129,05%, Kabupaten Bantul antara 101,78% sampai dengan 127,57%, Kabupaten Kulon Progo antara 98,65% sampai dengan 123,42%, Kabupaten Gunung Kidul antara 108,06% sampai dengan 157,27% dan Pemerintah Kota Yogyakarta antara 104,55% sampai dengan 128,47%, 2) Kabupaten Sleman tahun anggaran yang paling efektif yaitu tahun anggaran 2003 yang kurang efektif tahun 2004, Kabupaten Bantul yang paling efektif tahun 2001 yang kurang efektif tahun 2002, Kabupaten Kulon Progo yang paling efektif tahun 2003 yang tidak efektif tahun 2005, Kabupaten Gunung Kidul yang paling efektif tahun 2004 yang kurang efektif tahun 2002 dan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran yang paling efektif adalah tahun anggaran 2001 dan yang kurang efektif adalah tahun anggaran 2003.

ABSTRACT

A Comparison of Effectiveness of Regional Tax Income of The Regency/Municipality Government during Regional Autonomy A Case Study at Regency/Municipality Government of Daerah Istimewa Yogyakarta

**By:
Rafael Ditya Ugrasena
012114091
Sanata Dharma University
2007**

This research aimed: 1) To know how much the level of effectiveness of regional tax income of Regency/Municipality Government of DIY during regional autonomy, 2) to compare the level of effectiveness of regional tax income in every Regency/Municipality Government of DIY. The type of the research conducted by the author was case study. The data needed in this research were the data of income of Regional Tax in the budget years of 2001, 2002, 2003, 2004 and 2005 from every Regency/Municipality. The techniques of data collecting used were interview and documentation. The data obtained were analysed by using analysis of effectiveness ratio.

The result of this research revealed that 1) the level of effectiveness of Regional Tax income of Sleman Regency on the average were 108,37% to 129,05%, Bantul Regency were between 101,78% to 125,57%, Kulon Progo Regency were between 98,65% to 123,42%, Gunung Kidul Regency were between 108,06% to 157,27% and Yogyakarta Municipality were between 104,55% to 128,47%. 2) In Sleman Regency the most effective fiscal period was 2003, the less effective was 2004, In Bantul Regency, the most effective was in 2001 and the less effective in 2002, In Kulon Progo Regency, the most effective was in 2003 and the one that was not effective was in 2005, Gunung Kidul Regency, the most effective was in 2004 and the less effective was in 2002 and in Yogyakarta Municipality, the fiscal period which was most effective was the fiscal period of 2001 and the less effective was the fiscal period of 2003.

KATA PENGANTAR

Segala hormat dan pujian penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Putera-Nya Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Kasih untuk segala rahmat dan karunia yang berlimpah yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perbandingan Efektivitas Penerimaan Pajak daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Selama Otonomi Daerah.”**

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum, M.S. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Terima kasih atas segala bimbingannya.
2. Bapak Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt. selaku Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Sanata Dharma. Terima kasih atas semua pertolongan dan bimbingannya.
3. Ibu Firma Sulistiyowati, SE., M.Si selaku dosen pembimbing pertama. Terima kasih banyak untuk seluruh waktu, tenaga, pikiran, masukan dan semangat serta kesabaran yang telah diberikan.
4. Bapak E. Maryarsanto P., SE, Akt. selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih banyak untuk seluruh waktu, tenaga, pikiran, masukan dan semangat serta kesabaran yang telah diberikan.

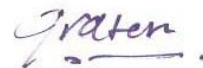
5. Segenap dosen di Prodi Akuntansi USD. Terima kasih karena telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya.
6. Mas Hastoro, Mas Yuli dan lainnya. Terima kasih banyak telah memberikan bantuan kepada saya selama belajar di Prodi Akuntansi USD.
7. Bapak Ir. H.Nanang Suwandi, MMA. Sebagai Kepala Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta stafnya yang telah menyediakan data-data yang saya butuhkan dalam penelitian.
8. Bapak Drs. Slamet Riyadi,MM Sebagai Kepala Bappeda Pemerintah kabupaten Sleman beserta stafnya yang telah menyediakan data-data yang saya butuhkan dalam penelitian.
9. Bapak Drs. Sudjono Sebagai Kepala Bappeda Pemerintah kabupaten Bantul beserta stafnya yang telah menyediakan data-data yang saya butuhkan dalam penelitian.
10. Bapak Ir. Djunianto Marsudi Utomo Sebagai Kepala Bappeda Pemerintah kabupaten Kulon Progo beserta stafnya yang telah menyediakan data-data yang saya butuhkan dalam penelitian.
11. Ibu Ir. Asti Wijayanti, MA Sebagai Kepala Bappeda Pemerintah kabupaten Gunung Kidul beserta stafnya yang telah menyediakan data-data yang saya butuhkan dalam penelitian.
12. Bapak Drs. Hardono Sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta beserta stafnya yang telah menyediakan data-data yang saya butuhkan dalam penelitian.

13. Alm. Bapak Antonius Suparman dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan materiil, terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam.
14. Cicilia Heni Liawati (CYRA), akhirnya Say skripsiku selesai. Terimakasih atas doa, dukungan dan masukan serta pengertian yang luar biasa.
15. Sahabatku terkasih Autaz Haqiki, Heri serta Heru Turi, warga Pringgodani, Komunitas Asrama Tenguyun, teman-teman kost Brojomusti 7, terima kasih untuk waktu, masukan dan kebersamaan kita selama ini.
16. Teman-temanku di Prodi Akuntansi USD, Gusur, Terong, Fitra, Mamat, Sontrot, Luis M.U Osok dan semuanya terima kasih ya untuk kebersamaan kita selama ini.
17. Teman-teman Akuntansi kelas B'01 dan teman-teman Akuntansi Angkatan'01, ternyata sekolah itu capek ya....

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 08 Juni 2007

Penulis



Rafael Ditya Ugrasena

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Otonomi Daerah	7
B. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah	8
C. Pengertian Efektivitas	9
D. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10
E. Pajak Daerah	12
F. Pajak Kabupaten/Kota	12
G. Pengertian Biaya Pemungutan	14
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	15
B. Subjek dan Objek Penelitian	15

C. Tempat dan Waktu Penelitian	16
D. Data Yang Diperlukan	16
E. Teknik Pengumpulan Data	16
F. Teknik Analisis Data	17
BAB IV : GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAERAH	
ISTIMEWA YOGYAKARTA	
A. Kabupaten Sleman	19
1. Keadaan Geografis	19
2. Keadaan Penduduk	20
3. Sosial	20
a. Pendidikan	20
b. Agama	21
c. Industri	21
B. Kabupaten Bantul	21
1. Keadaan Geografis	21
2. Keadaan Penduduk	21
3. Sosial	22
a. Pendidikan	22
b. Agama	22
c. Industri	22
C. Kabupaten Kulon Progo	23
1. Keadaan Geografis	23
2. Keadaan Penduduk	23
3. Sosial	23
a. Pendidikan	23
b. Agama	24
c. Industri	24
D. Kabupaten Gunung Kidul	25
1. Keadaan Geografis	25

2. Keadaan Penduduk	25
3. Sosial	26
a. Pendidikan	26
b. Agama	26
c. Industri.....	26
E. Kota Yogyakarta	27
1. Keadaan Geografis	27
2. Keadaan Penduduk	27
3. Sosial	28
a. Pendidikan	28
b. Agama	28
c. Industri	28
BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN	30
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Keterbatasan Penelitian	47
C. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel V.1 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman	31
Tabel V.2 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bantul	34
Tabel V.3 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo	37
Tabel V.3 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Gunung Kidul	40
Tabel V.3 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2001, 2002, 2003, 2004, 2005	51
Lampiran 2: Data Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2001, 2002, 2003, 2004, 2005	51
Lampiran 3: Data Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2001, 2002, 2003, 2004, 2005	52
Lampiran 4: Data Penerimaan Pajak Daerah kabupaten Gunung Kidul Tahun Anggaran 2001, 2002, 2003, 2004, 2005	52
Lampiran 5: Data Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2001, 2002, 2003, 2004, 2005	53
Lampiran 6: Surat Keterangan Izin Penelitian	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan dimaksud dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Maksud dari pemberian otonomi adalah untuk pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala segi kehidupan, di mana dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan menyesuaikan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka UU No. 22 Tahun 1999 diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang intinya adalah pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan, pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah juga perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Salah satu sumber pendapatan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 beserta aturan dan pelaksanaannya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah yang merupakan sumber penerimaan dari daerah dan salah satu bagian dari PAD juga perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat.

Di Indonesia jenis pajak daerah yang ditentukan oleh pemerintah daerah tingkat I (propinsi) disebut juga pajak tingkat I dan di tingkat II disebut pajak daerah tingkat II (Kabupaten/Kota). Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun

2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pada penelitian sebelumnya, Suni (2005) melakukan penelitian tentang peranan pajak daerah terhadap penerimaan daerah dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan daerah masih kecil dan cenderung meningkat. Nubi (2003) melakukan penelitian tentang analisis perkembangan pendapatan pajak daerah dan hasil penelitian adalah perkembangan pajak daerah selalu meningkat. Dewi (2004) melakukan penelitian tentang analisis perkembangan penerimaan dan kontribusi pajak daerah sebelum dan selama otonomi khusus dan hasil penelitian menunjukkan tidak ada perkembangan yang signifikan. Candra (2004) melakukan penelitian tentang perkembangan dan prediksi pendapatan pajak daerah, hasil penelitian menunjukkan penurunan pendapatan pajak daerah. Atas dasar inilah penulis melakukan penelitian tentang Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dengan menggunakan Rasio Efektivitas karena penulis melihat potensi dari Pajak daerah yang sebenarnya cukup besar untuk mendukung pembiayaan Daerah dan selanjutnya untuk mengetahui apakah semua penerimaan Pajak Daerah sudah efektif atau belum.

B. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar efektivitas penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota selama Otonomi Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana perbandingan efektivitas penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota selama Otonomi Daerah untuk tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2005?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta selama otonomi daerah.
2. Untuk membandingkan efektivitas penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota pada setiap Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota.
2. Bagi Universitas, dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang ingin memperdalam pengetahuan tentang keuangan daerah khususnya Pajak Daerah Kabupaten/Kota.
3. Bagi penulis, sebagai sarana untuk memperkaya dan menerapkan teori-teori yang diperoleh ke dalam praktik-praktik yang sesungguhnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dibuat oleh penulis ini secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai salah satu dari unsur reformasi total yaitu pemberian otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Undang-Undang yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dari latar belakang yang sudah tertuang di atas tersebut kemudian diambil atau dirumuskan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar-dasar teori yang dipakai oleh penulis dalam melakukan penelitian nanti. Pembahasan tersebut berupa uraian mengenai pengertian otonomi daerah, prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah, pengertian efektivitas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengertiannya dan Pajak Daerah beserta komponen-komponennya.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian yang dipakai yaitu studi kasus yang dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembahasan

berikutnya yaitu subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian serta teknik analisis data yang dipakai.

Bab IV : Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah berdirinya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, luas wilayah dan keadaan penduduk.

Bab V : Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini akan digunakan analisis data yaitu dengan menggunakan Rasio Efektivitas.

Bab VI : Penutup

Pada bab ini akan ditulis kesimpulan dan hasil analisis data yang digunakan juga berisi tentang keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Otonomi Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Tujuan itu mempunyai tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu (Mardiasmo, 2002:46):

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (*publik*) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

B. Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut (Bratakusumah dan Solihin, 2002:4-5):

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.
- c. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan otonomi Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
- f. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.

- g. Pelaksanaan Otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- h. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai daerah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.
- i. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan tugas.

C. Pengertian Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Efektivitas dalam Pemerintah Daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan di dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang telah direncanakan. Namun demikian, walaupun ada yang dilaksanakan menyimpang

dari rencana semula, tetapi mempunyai dampak yang menguntungkan pada kelompok penerima sasaran manfaat, maka dapat dikatakan efektif. Semakin besar kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai adalah lebih dari 1 (satu) atau lebih dari 100 persen. Semakin tinggi tingkat rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik dan efektif. Maksudnya setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi (Halim, 2004:134).

D. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah, diperoleh dari kewajiban penduduk menyerahkan dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan

yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Dalam hal ini, pajak daerah mempunyai beberapa persyaratan antara lain:

- a. Tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijakan pemerintah pusat.
 - b. Harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya.
 - c. Biaya administrasi harus mudah.
 - d. Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah, serta dapat dipaksakan.
2. Hasil Retribusi Daerah, berupa pemungutan uang sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah, baik yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan pemerintah daerah dan berdasarkan peraturan daerah.
 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dari Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan, antara lain adalah: bagian laba, dividen dan penjualan saham milik daerah.
 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang dianggap sah, antara lain berupa hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Dari penggolongan di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004: 93-94).

E. Pajak Daerah

Secara umum, pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Prakosa, 2005:1-2).

F. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/ Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Pajak Kabupaten/Kota yang berlaku di Indonesia sampai saat ini (Halim, 2004:95), terdiri dari:

2. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

3. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

4. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olahraga.

5. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

6. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

G. Pengertian Biaya Pemungutan

Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Sedangkan arti dari pemungutan itu sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak Daerah, penentuan besarnya pungutan yang terutang sampai kegiatan penagihan serta pengawasan penyetorannya. Menurut keputusan Mendagri No.35 Tahun 2002 besarnya biaya pemungutan paling tinggi 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kasus yaitu penelitian terhadap suatu objek tertentu dalam waktu tertentu di mana dari data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

- a. BAPEDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. BAPPEDA Kabupaten Sleman
- c. BAPPEDA Kabupaten Bantul
- d. BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo
- e. BAPPEDA Kabupaten Gunung Kidul
- f. BAPPEDA Kota Yogyakarta
- g. BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta
- h. BPS Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah data Penerimaan Pajak Daerah dan Biaya Pemungutan Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta selama otonomi daerah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian akan dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2007 sampai dengan bulan Maret tahun 2007.

D. Data yang Diperlukan

1. Sejarah atau gambaran umum Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota selama otonomi daerah tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2005.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data primer digunakan untuk menjawab masalah penelitian langsung pada objek penelitian, atau memberikan pertanyaan kepada pihak yang berwenang untuk memberikan data-data yang berkaitan dengan penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data sekunder dengan cara mengumpulkan data literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan landasan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan yang pertama, penulis menggunakan Rasio Efektivitas dengan rumus (Halim, 2004:93) :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Langkah-langkah untuk melakukan perhitungan Rasio Efektivitas adalah:

1. Mengidentifikasi antara target penerimaan dan realisasi penerimaan Pajak Daerah.
2. Menentukan tingkat Efektivitas dengan menggunakan rumus Rasio Efektivitas.
3. Membuat tabel target penerimaan Pajak Daerah dan realisasi penerimaan Pajak Daerah selama otonomi daerah tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

Untuk menjawab permasalahan yang kedua, penulis membandingkan tingkat rasio efektivitas penerimaan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2001-2005
2. Menentukan tahun penerimaan yang paling efektif dalam hal pemungutan Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah/Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta dari hasil perbandingan rasio efektivitas.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu propinsi yang berada di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, di bagian Timur Laut, Tenggara, Barat dan Barat Laut dibatasi oleh wilayah Jawa Tengah yang meliputi:

- Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut.
- Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara.
- Kabupaten Purworejo di sebelah Barat.
- Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut.

Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara $7^{\circ}.33 - 80.12$ Lintang selatan dan $110^{\circ}.00 - 110^{\circ}.50$ Bujur Timur, dengan luas wilayah $3.185,80\text{km}^2$ atau 0,17% dari luas Indonesia ($1.890.754 \text{ km}^2$), merupakan Propinsi terkecil setelah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari:

A. KABUPATEN SLEMAN

1. Keadaan Geografis

Wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai dari $107^{\circ} 15' 03''$ sampai dengan $100^{\circ} 34' 51''$ Bujur Timur, dan mulai dari $7^{\circ} 34' 51''$ sampai dengan $7^{\circ} 47' 03''$ Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 100 – 2.500 meter di

atas permukaan laut. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun. Bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2005, jumlah penduduk Sleman tercatat 885.727 jiwa, terdiri dari 437.967 laki-laki dan 447.760 perempuan dengan luas wilayah 574,82 km². Kepadatan penduduk 1.643 jiwa per km².

3. Sosial

a. Pendidikan

Pada jenjang SD, tahun 2005 memiliki 503 unit sekolah dengan jumlah murid sebanyak 78.768 anak dan diasuh oleh 4.242 guru. Untuk jenjang SLTP tercatat sebanyak 105 unit sekolah dengan jumlah murid 30.905 anak dan diasuh oleh 2.623 guru. Sedangkan pada jenjang SMU tercatat sebanyak 51 unit sekolah dengan jumlah murid 13.560 anak dan diasuh oleh 1.465 guru.

b. Agama

Komposisi penduduk menurut agama yang dipeluk pada tahun 2005 tercatat sekitar 878.812 orang beragama Islam, 56.710 orang beragama Katholik, 22.606 orang beragama Kristen, 1.234 orang beragama Hindu dan 746 orang beragama Budha.

c. Industri

Industri menurut bidangnya dibagi menjadi dua sektor yaitu Sektor Industri kecil dan Sektor Industri Besar-Menengah. Pada tahun 2005 perusahaan Industri Kecil sebanyak 14.764 perusahaan, sedangkan Industri Besar-Menengah sebanyak 71 perusahaan.

B. KABUPATEN BANTUL**1. Keadaan Geografis**

Posisi kabupaten Bantul terletak antara $110^{\circ} 12' 34''$ sampai $110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 44' 04''$ sampai $8^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan. Bagian Utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data registrasi penduduk akhir tahun 2004, jumlah penduduk Kabupaten Bantul adalah 796.863 jiwa yang tersebar di 75 Desa di

17 Kecamatan. Dari jumlah tersebut 390.534 jiwa adalah laki-laki dan 406.329 jiwa adalah perempuan. Dengan luas wilayah 506,85 km² dan dengan kepadatan penduduknya 1.572 per km².

3. Sosial

a. Pendidikan

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah SD Negeri di Kabupaten Bantul pada tahun 2004 adalah 376 buah, SD Swasta 67 buah, SLTP Negeri 48 buah, SLTP Swasta 46 buah, SMU Negeri 19 buah, SMU Swasta 20 buah, SM Kejuruan Negeri 7 buah dan SM Kejuruan Swasta 19 buah.

b. Agama

Berdasarkan data dari Departemen Agama, jumlah penduduk pemeluk agama Islam sebanyak 759.364 orang, pemeluk agama Katholik 19.150 orang, pemeluk agama Kristen 11.949 orang, pemeluk agama Hindu 663 orang dan pemeluk agama Budha 237 orang.

c. Industri

Berdasarkan data Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, jumlah industri kecil pada tahun 2005 tercatat sebanyak 17.936 usaha dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan 66.253 orang. Sedangkan untuk industri besar/sedang tercatat 140 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 15.757 orang.

C. KABUPATEN KULON PROGO

1. Keadaan Geografi

Kabupaten Kulon Progo terletak pada $110^{\circ}1'37''$ sampai dengan $110^{\circ}16'26''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}38'42''$ sampai dengan $7^{\circ}59'3''$ Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 100 – 1.000 meter di atas permukaan laut. Luas kabupaten Kulon Progo adalah 586,28 km² yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 88 Desa. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk menurut registrasi pertengahan tahun 2005 sebesar 449.811 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 219.918 jiwa dan penduduk perempuan 229.893 jiwa. Kepadatan penduduk sebesar 767 jiwa per km².

3. Sosial

a. Pendidikan

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah SD Negeri di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2005 sebanyak 311 buah, SD Swasta 61 buah, SLTP Negeri 39 buah, SLTP Swasta 32 buah, SMU Negeri 11 buah, SMU Swasta 8 buah, SMK Negeri 3 buah, dan SMK Swasta 20 buah.

b. Agama

Di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2005 pemeluk agama Islam merupakan mayoritas yaitu 93,56 persen, pemeluk agama Kristen 1,67 persen, pemeluk agama Katolik 4,61 persen, pemeluk agama Budha 0,15 persen, dan pemeluk agama Hindu 0,00 persen.

4. Industri

Industri kayu, barang-barang dari kayu, bambu (tidak termasuk furniture), dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya menyerap tenaga paling banyak, yaitu 43,72 persen, kemudian diikuti oleh industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia sebesar 34,22 persen.

Biaya input rata-rata yang diperlukan untuk bahan baku mencapai 73,35 persen, bahan bakar minyak dan pelicin 2,46 persen, bahan lain (diluar) bahan baku dan bahan penolong 15,26 persen, listrik yang dibeli 9,85 persen, dan sewa gudang serta alat-alat 0,07 persen.

Selama kurun waktu 2004-2005 perkembangan potensi industri cukup mengesankan. Hal ini terlihat dari perkembangna komponen-komponennya yang meliputi : meningkatnya jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja yang diserap, nilai investasi yang masuk, nilai produksi yang dicapai, dan nilai tambah yang dihasilkan. Demikian juga untuk sentra industri selama dua tahun terakhir semua komponen berkembang cukup baik.

D. KABUPATEN GUNUNG KIDUL

1. Keadaan Geografi

Kabupaten Gunung Kidul terletak antara 78 46' sampai 88 09' Lintang Selatan dan 1108 21' sampai 1108 50' Bujur Timur dengan ketinggian yang bervariasi antara 0 – 700 meter diatas permukaan laut, yang berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Propinsi Jawa Tengah disebelah utara. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Propinsi Jawa Tengah. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Luas wilayah Kabupaten Gunung Kidul tercatat 1.485,36 km² yang meliputi 18 Kecamatan dan 144 Desa/Kelurahan. Kecamatan Semanu merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar 108,39 km² atau sekitar 7,30 persen luas Kabupaten Gunung Kidul.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk Kabupaten Gunung Kidul berdasarkan hasil registrasi pertengahan tahun 2005 berjumlah 735.008 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan dan 144 desa, dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Wonosari yaitu 78.464 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Gunung Kidul pada akhir tahun telah mencapai 754.047 jiwa.

3. Sosial

a. Pendidikan

Dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan oleh Pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat mengenyam bangku pendidikan. Peningkatan masyarakat untuk memperoleh bangku pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatana penyediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai.

b. Agama

Ditinjau dari jumlah pemeluk agama, pada tahun 2005 di Kabupaten Gunung Kidul tercatat ada 716.783 umat Islam, 14.792 umat Kristen, 16.659 umat Katolik, 1.962 umat Hindu, dan 443 umat Budha.

Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama. Tempat peribadatan pada tahun 2005 tercatat untuk umat Islam sebanyak 2.383 unit, umat Katolik sebanyak 79 unit, umat Kristen 48 unit, umat Hindu sebanyak 13 unit, dan umat Budha sebanyak 6 unit.

4. Industri

Sektor industri dapat dibedakan atas Industri Besar, Sedang, Kecil, dan Rumah Tangga. Banyak industri pada tahun 2005 di Kabupaten Gunung Kidul untuk Industri Besar tercatat 3 perusahaan, Industri sedang tercatat ada

6 perusahaan. Industri Kecil ada 5.571 perusahaan, dan Industri Rumah Tanga ada 13.228 perusahaan. Secara keseluruhan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 49.223 orang.

E. KOTA YOGYAKARTA

1. Keadaan Geografi

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara 1108 24' 19" sampai 1108 28' 53" Bujur Timur dan antara 078 49' 26" sampai 078 15' 24" Lintang Selatan, dengan batas wilayah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman, Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul, Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Kota Yogyakarta memiliki luas sekitar 32,5 km² yang terdiri dari 14 kecamatan dan 45 desa/kelurahan.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi sensus penduduk 2000 jumlah penduduk tahun 2005 tercatat 392.239 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48,93 persen laki-laki dan 51,07 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

3. Sosial

a. Pendidikan

Pada tingkat pendidikan pra sekolah dan menengah sebagian besar diselenggarakan oleh pihak swasta. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dasar lebih banyak diselenggarakan oleh pemerintah.

Pada tahun ajaran 2004/2005 di Kota Yogyakarta terdapat 50 perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi tersebut terdiri dari 8 universitas, 10 institut atau sekolah tinggi, dan 32 akademi. Jumlah dosen sebanyak 5.074 orang yang terdiri dari 4.723 orang dosen yayasan dan 351 orang dosen DPK. Jumlah mahasiswa yang terdaftar sebanyak 75.876 orang.

b. Agama

Penduduk Kota Yogyakarta mayoritas memeluk agama Islam. Jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 323.432 orang atau 82,46 persen dari total penduduk Kota Yogyakarta. Pemeluk agama yang lain adalah 10,57 persen Katolik, 6,27 persen Kristen, 0,20 persen Hindu, dan 0,40 persen Budha.

4. Industri

Perusahaan industri besar dan sedang di Kota Yogyakarta pada tahun 2003 sebanyak 112 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 8.567 orang. Informasi mengenai industri kecil yang diperoleh dari Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta pada tahun 2005 jumlah industri kecil tercatat 5.785 unit

dengan jumlah tenaga kerja 29.880 orang dan nilai investasi sebesar Rp.146.188 juta.

BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang sudah penulis sebutkan di bab sebelumnya, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah dengan langkah-langkah serta rumus sebagai berikut ini

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Contoh perhitungan efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman:

Pada Kabupaten Sleman target penerimaan pajak daerah tahun 2001 adalah Rp14.776.059.092,36 dan realisasi penerimaan pajak daerahnya adalah Rp16.013.541.342,60 (Angka dari tabel Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman pada lampiran).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 16.013.541.342,60}{\text{Rp } 14.776.059.092,36} \times 100\% = 108,37\%$$

Secara jelas efektivitas penerimaan pajak daerah ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel V.1
Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (A)	Target Penerimaan Pajak Daerah (B)	Efektivitas (A:B)
Tahun 2001	Rp16.013.541.342,60	Rp14.776.059.092,36	108,37 %
Tahun 2002	Rp21.374.480.252,58	Rp17.584.379.338,95	121,55 %
Tahun 2003	Rp24.907.210.488	Rp19.300.000.000	129,05 %
Tahun 2004	Rp30.715.060.955,07	Rp28.327.600.000	108,43 %
Tahun 2005	Rp41.141.393.271,38	Rp33.067.768.825	124,42 %

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman.

Tabel V.1 menunjukkan efektivitas penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman selama otonomi daerah tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2005. Dari hasil penghitungan di atas, secara umum penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman sudah efektif karena tingkat efektivitas sudah mencapai lebih dari 100 %. Tingkat efektivitas di Kabupaten Sleman berkisar antara 108,37 % sampai dengan 129,05 %.

A. Efektivitas Tahun Anggaran 2001-2005

1. Tahun Anggaran 2001:

Pada tahun anggaran 2001, efektivitas mencapai 108,37 % yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan Pajak Daerah sudah efektif karena terdapat kelebihan target sebesar 8,37 %. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2001 adalah Rp14.776.059.092,36 dan dapat terealisasi

sebesar Rp16.013.541.342,60 yang berarti terdapat kelebihan target Pajak Daerah sebesar Rp1.237.482.250,24.

2. Tahun Anggaran 2002:

Pada tahun anggaran 2002, efektivitas mencapai 121,55 % yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan Pajak Daerah sudah efektif karena terdapat kelebihan target sebesar 21,55 %. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2002 adalah Rp17.584.379.338,95 dan dapat terealisasi sebesar Rp21.374.480.252,58 yang berarti terdapat kelebihan target Pajak Daerah sebesar Rp3.790.100.913,63.

3. Tahun Anggaran 2003:

Pada tahun anggaran 2003, efektivitas mencapai 129,05 % yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan pajak daerah sudah efektif karena terdapat kelebihan target sebesar 29,05 %. Target penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2003 adalah Rp19.300.000.000 dan dapat terealisasi sebesar Rp24.907.210.488 yang berarti terdapat kelebihan target pajak daerah sebesar Rp5.607.210.488.

4. Tahun Anggaran 2004:

Pada tahun anggaran 2004, efektivitas mencapai 108,43 % yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan pajak daerah sudah efektif karena ada kelebihan target sebesar 8,43 %. Target penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2004 adalah Rp28.327.600.000 dan dapat terealisasi sebesar

Rp30.715.060.955,07 yang berarti mengalami kelebihan target pajak daerah sebesar Rp2.387.460.955,07.

5. Tahun Anggaran 2005:

Pada tahun anggaran 2005, efektivitas mencapai 124,42 % yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan pajak daerah sudah efektif karena ada kelebihan target sebesar 24,42 %. Target penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2005 adalah Rp33.067.768.825 dan dapat terealisasi sebesar Rp41.141.393.271,38 yang berarti terdapat kelebihan target pajak daerah sebesar Rp8.073.624.446,38.

B. Analisis Efektivitas

Dari hasil perhitungan di atas, prosentase perubahan efektivitas di Kabupaten Sleman mengalami fluktuasi karena perubahan efektivitasnya dari tahun ke tahun tidak konstan, sehingga dapat ditentukan tahun anggaran 2001 adalah tahun anggaran yang kurang efektif dibandingkan tahun anggaran lain, karena hanya mencapai efektivitas sebesar 108,37 % atau dengan kata lain hanya terdapat kelebihan target sebesar 8,37 %.

Tahun anggaran yang paling efektif, terjadi pada tahun anggaran 2003 karena efektivitas mencapai 129,05 % yang berarti pada tahun anggaran 2003 mengalami kelebihan target pajak daerah sebesar 29,05 %.

Tabel V.2
Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (A)	Target Penerimaan Pajak Daerah (B)	Efektivitas (A:B)
Tahun 2001	Rp 2.674.755.471	Rp 2.096.679.791	127,57 %
Tahun 2002	Rp 4.888.908.506	Rp 4.803.611.193	101,78 %
Tahun 2003	Rp 6.600.583.794	Rp 6.437.296.400	102,54 %
Tahun 2004	Rp 7.085.891.785	Rp 6.951.700.000	101,93 %
Tahun 2005	Rp 7.837.546.787	Rp 7.688.500.000	101,94 %

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKD) Kabupaten Bantul

Tabel V.2 menunjukkan efektivitas penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul selama otonomi daerah tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2005. Dari hasil penghitungan di atas, secara umum penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul sudah efektif karena efektivitas sudah mencapai lebih dari 100%. Tingkat efektivitas di Kabupaten Bantul berkisar antara 101,78% sampai dengan 127,57%.

A. Efektivitas Tahun Anggaran 2001-2005

1. Tahun Anggaran 2001:

Pada tahun anggaran 2001, efektivitas mencapai 127,57% yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan Pajak Daerah sudah efektif karena terdapat kelebihan target sebesar 27,57%. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2001 adalah Rp2.096.679.791 dan dapat terealisasi sebesar Rp2.674.755.471 yang berarti terdapat kelebihan target Pajak Daerah sebesar Rp578.075.680.

2. Tahun Anggaran 2002:

Pada tahun anggaran 2002, efektivitas mencapai 101,78% yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan Pajak Daerah sudah efektif karena terdapat kelebihan target sebesar 1,78%. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2002 adalah Rp4.803.611.193 dan dapat terealisasi sebesar Rp4.888.908.506 yang berarti terdapat kelebihan target Pajak Daerah sebesar Rp85.297.313.

3. Tahun Anggaran 2003:

Pada tahun anggaran 2003, efektivitas mencapai 102,54% yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan Pajak Daerah sudah efektif karena terdapat kelebihan target sebesar 2,54%. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2003 adalah Rp6.437.296.400 dan dapat terealisasi sebesar Rp6.600.583.794 yang berarti terdapat kelebihan target Pajak Daerah sebesar Rp163.287.394.

4. Tahun Anggaran 2004:

Pada tahun anggaran 2004, efektivitas mencapai 101,93% yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan Pajak Daerah sudah efektif karena terdapat kelebihan target sebesar 1,93%. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2004 adalah Rp6.951.700.000 dan dapat terealisasi sebesar Rp7.085.891.785 yang berarti terdapat kelebihan target Pajak Daerah sebesar Rp134.191.785.

5. Tahun Anggaran 2005:

Pada tahun anggaran 2005, efektivitas mencapai 101,94% yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan Pajak Daerah sudah efektif karena terdapat kelebihan target sebesar 1,94%. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2005 adalah Rp7.688.500.000 dan dapat terealisasi sebesar Rp7.837.546.787 yang berarti terdapat kelebihan target Pajak Daerah sebesar Rp149.046.787.

B. Analisis Efektivitas

Dari hasil penghitungan di atas, prosentase perubahan efektivitas di Kabupaten Bantul relatif stabil, namun demikian perubahan efektivitasnya dari tahun ke tahun belum konstan sehingga masih mengalami fluktuasi namun tidak signifikan. Tahun anggaran 2002 adalah tahun anggaran yang kurang efektif dibandingkan tahun anggaran lainnya, karena hanya mencapai efektivitas sebesar 101,78% atau dengan kata lain hanya terdapat kelebihan target Pajak Daerah sebesar 1,78%.

Tahun anggaran yang paling efektif justru terjadi pada tahun awal dimulainya pelaksanaan otonomi daerah, yaitu pada tahun anggaran 2001 yang tingkat efektivitasnya mencapai 127,57% yang berarti terdapat kelebihan target Pajak Daerah sebesar 27,57%.

Tabel V.3
Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (A)	Target Penerimaan Pajak Daerah (B)	Efektivitas (A:B)
Tahun 2001	Rp 901.975.302,20	Rp 845.504.000	106,68 %
Tahun 2002	Rp 1.396.710.526	Rp 1.261.038.916	110,76 %
Tahun 2003	Rp 2.067.035.684,83	Rp 1.674.824.600	123,42 %
Tahun 2004	Rp 2.325.069.244,30	Rp 2.144.780.000	108,41 %
Tahun 2005	Rp 2.488.959.377,51	Rp 2.523.000.000	98,65 %

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKD) Kabupaten Kulon Progo.

Tabel V.3 menunjukkan efektivitas penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo selama otonomi daerah tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2005. Dari hasil penghitungan di atas, bisa dilihat bahwa penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo selama dua periode terakhir yaitu pada periode 2004 dan periode 2005 mengalami penurunan bahkan pada tahun 2005 penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo tidak efektif, ini dikarenakan target yang ditetapkan lebih besar dari realisasi penerimaannya sehingga pada tahun 2005 efektivitasnya hanya mencapai angka 98,65%.

A. Efektivitas Tahun Anggaran 2001-2005

1. Tahun Anggaran 2001:

Pada tahun anggaran 2001, efektivitas mencapai 106,68% yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan Pajak Daerah sudah efektif karena terdapat kelebihan target sebesar 6,68%. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2001 adalah Rp845.504.000 dan dapat terealisasi sebesar

Rp901.975.302,20 yang berarti terdapat kelebihan target penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp56.471.302,20

2. Tahun Anggaran 2002:

Pada tahun anggaran 2002, efektivitas mencapai 110,76% yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan Pajak Daerah sudah efektif karena terdapat kelebihan target sebesar 10,76%. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2002 adalah Rp1.261.038.916 dan dapat terealisasi sebesar Rp1.396.710.526 sehingga ada kelebihan target sebesar Rp135.671.610

3. Tahun Anggaran 2003:

Pada tahun anggaran 2003, efektivitas mencapai 123,42% yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan Pajak Daerah sudah efektif karena terdapat kelebihan target sebesar 23,42%. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2003 adalah Rp1.674.824.600 dan dapat terealisasi sebesar Rp2.067.035.684,83 yang berarti terdapat kelebihan target sebesar Rp392.211.084,83.

4. Tahun Anggaran 2004:

Pada tahun anggaran 2004, efektivitas mencapai 108,41% yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan Pajak Daerah sudah efektif karena ada kelebihan target sebesar 8,41%. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2004 adalah Rp2.144.780.000 dan dapat terealisasi sebesar Rp2.325.069.244,30 sehingga ada kelebihan target sebesar Rp180.289.244,30.

5. Tahun Anggaran 2005:

Pada tahun anggaran 2005, efektivitas hanya mencapai 98,65% yang berarti bahwa pada tahun anggaran tersebut penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo tidak efektif karena ada kekurangan dari target sebesar 1,35%. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2005 adalah Rp2.523.000.000 dan hanya terealisasi sebesar Rp2.488.959.377,51 sehingga ada kekurangan target sebesar Rp34.040.622,49.

B. Analisis Efektivitas

Dari hasil penghitungan di atas, prosentase perubahan efektivitas di Kabupaten Kulon Progo juga selalu berubah-ubah atau mengalami fluktuasi. Sama dengan daerah lain, perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun juga tidak tetap ataupun konstan, sehingga dapat diketahui bahwa dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2004 penerimaan Pajak Daerah sudah efektif.

Tahun anggaran 2003 adalah tahun anggaran yang paling efektif karena efektivitasnya mencapai 123,42% atau terdapat kelebihan target sebesar 23,42%. Tahun anggaran 2005 di Kabupaten Kulon Progo penerimaan Pajak Daerahnya justru tidak efektif, karena efektivitasnya hanya mencapai 98,65% yang berarti mengalami kekurangan dari target sebesar 1,35%.

Tabel V.4
Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Gunung Kidul
Tahun Anggaran 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (A)	Target Penerimaan Pajak Daerah (B)	Efektivitas (A:B)
Tahun 2001	Rp 713.745.375	Rp 807.150.110,45	113,09 %
Tahun 2002	Rp 909.400.000	Rp 982.690.105,95	108,06 %
Tahun 2003	Rp 1.559.658.159	Rp 1.892.344.797,92	121,33 %
Tahun 2004	Rp 1.922.408.159	Rp 3.023.328.424	157,27 %
Tahun 2005	Rp 3.200.000.000	Rp 4.433.568.230,71	138,55 %

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKD) Kabupaten Gunung Kidul..

Tabel V.4 menunjukkan efektivitas penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Gunung Kidul selama otonomi daerah tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2005. Dari hasil penghitungan di atas, secara umum penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Gunung Kidul sudah efektif karena efektivitas yang dicapai sudah lebih dari 100%. Efektivitas di Kabupaten Gunung Kidul berkisar antara 108,06% sampai dengan 157,27%.

A. Efektivitas Tahun Anggaran 2001-2005

1. Tahun Anggaran 2001:

Pada tahun anggaran 2001, efektivitas mencapai 113,09% yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Gunung Kidul sudah efektif karena ada kelebihan target sebesar 13,09%. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2001 adalah Rp 713.745.375 dan dapat terealisasi sebesar Rp 807.150.110,45 sehingga terdapat kelebihan target Pajak Daerah sebesar Rp 93.404.735,45.

2. Tahun Anggaran 2002:

Pada tahun anggaran 2002, efektivitasnya mencapai 108,06% yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan Pajak Daerahnya sudah efektif karena da kelebihan target sebesar 8,06%. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2002 adalah Rp 909.400.000 dan dapat terealisasi sebesar Rp 982.690.105,95 sehingga ada kelebihan target sebesar Rp73.290.105,95.

3. Tahun anggaran 2003:

Pada tahun anggaran 2003, efektivitas mencapai 121,33% yang berarti pada tahun anggaran tersebut, penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Gunung Kidul sudah efektif karena terdapat kelebihan target sebesar 21,33%. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2003 adalah Rp1.559.658.159 dan dapat terealisasi sebesar Rp 1.892.344.797,92 sehingga ada kelebihan target sebesar Rp 332.686.638,92.

4. Tahun Anggaran 2004:

Pada tahun anggaran 2004, efektivitasnya mencapai 157,27% yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan Pajak Daerah sudah efektif karena ada kelebihan target sebesar 57,27%. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2004 adalah sebesar Rp 1.922.408.159 dan dapat terealisasi sebesar Rp 3.023.328.424 sehingga ada kelebihan target penerimaan sebesar Rp 1.100.920.265.

5. Tahun Anggaran 2005:

Pada tahun anggaran 2005, efektivitasnya mencapai 138,55% yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Gunung Kidul sudah efektif karena terdapat kelebihan target sebesar 38,55%. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2005 adalah Rp 3.200.000.000 dan dapat terealisasi sebesar Rp 4.433.568.230,71 sehingga ada kelebihan target sebesar Rp 1.233.568.230,71.

B. Analisis Efektivitas

Dari hasil penghitungan di atas, prosentase perubahan efektivitas di Kabupaten Gunung Kidul sudah efektif, namun demikian perubahan efektivitasnya dari tahun ke tahun juga belum konstan sehingga masih mengalami fluktuasi. Tahun anggaran 2004 adalah tahun anggaran yang paling efektif dibandingkan tahun anggaran lainnya, karena efektivitasnya mampu mencapai angka 157,27% atau dengan kata lain hanya terdapat kelebihan target Pajak Daerah sebesar 57,27%.

Tahun anggaran yang kurang efektif dibandingkan tahun anggaran lainnya terjadi pada tahun anggaran 2002 yang efektivitasnya hanya mencapai 108,06% yang berarti hanya terdapat kelebihan target Pajak Daerah sebesar 8,06%.

Tabel V.5
Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (A)	Target Penerimaan Pajak Daerah (B)	Efektivitas (A:B)
Tahun 2001	Rp 22.886.374.632,50	Rp 17.814.447.520	128,47 %
Tahun 2002	Rp 30.519.661.523	Rp 27.107.396.233	112,59 %
Tahun 2003	Rp 33.526.514.267	Rp 32.068.358.000	104,55 %
Tahun 2004	Rp 40.581.980.256	Rp 38.149.900.000	106,38 %
Tahun 2005	Rp 46.106.723.372	Rp 43.365.000.000	106,32 %

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tabel V. menunjukkan efektivitas penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta selama otonomi daerah tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2005. Dari hasil penghitungan di atas, secara umum penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sudah efektif karena efektivitas yang dicapai sudah lebih dari 100%. Efektivitas Pemerintah Kota Yogyakarta berkisar antara 104,55% sampai dengan 128,47%.

A. Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2001-2005

1. Tahun Anggaran 2001:

Pada tahun anggaran 2001, efektivitas mencapai 128,47% yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sudah efektif karena ada kelebihan target sebesar 28,47%. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2001 adalah Rp 17.814.447.520 dan dapat terealisasi sebesar Rp 22.886.374.632,50 sehingga terdapat kelebihan target Pajak Daerah sebesar Rp 5.071.927.112,50.

2. Tahun Anggaran 2002:

Pada tahun anggaran 2002, efektivitasnya mencapai 112,59% yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan Pajak Daerahnya sudah efektif karena da kelebihan target sebesar 12,59%. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2002 adalah Rp 27.107.396.233 dan dapat terealisasi sebesar Rp 30.519.661.523 sehingga ada kelebihan terget sebesar Rp3.412.265.290

3. Tahun anggaran 2003:

Pada tahun anggaran 2003, efektivitas mencapai 104,55% yang berarti pada tahun anggaran tersebut, penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sudah efektif karena terdapat kelebihan target sebesar 4,55%. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2003 adalah Rp32.068.358.000 dan dapat terealisasi sebesar Rp 33.526.514.267 sehingga ada kelebihan target sebesar Rp 1.458.156.267.

4. Tahun Anggaran 2004:

Pada tahun anggaran 2004, efektivitasnya mencapai 106,38% yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan Pajak Daerah sudah efektif karena ada kelebihan target sebesar 6.38%. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2004 adalah sebesar Rp 38.149.900.000 dan dapat terealisasi sebesar Rp 40.581.980.256 sehingga ada kelebihan target penerimaan sebesar Rp 2.432.080.256.

5. Tahun Anggaran 2005:

Pada tahun anggaran 2005, efektivitasnya mencapai 106,32% yang berarti pada tahun anggaran tersebut penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sudah efektif karena terdapat kelebihan target sebesar 6,32%. Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2005 adalah Rp43.365.000.000 dan dapat terealisasi sebesar Rp 46.106.723.372 sehingga ada kelebihan target sebesar Rp 2.741.723.372.

B. Analisis Efektivitas

Dari hasil penghitungan di atas, prosentase perubahan efektivitas penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta juga selalu berubah-ubah atau mengalami fluktuasi. Sama dengan daerah lain, perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun juga tidak tetap ataupun konstan, walaupun dapat diketahui bahwa dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2004 penerimaan Pajak Daerah sudah efektif.

Tahun anggaran 2001 adalah tahun anggaran yang paling efektif karena efektivitasnya mencapai 128,47% atau terdapat kelebihan target sebesar 28,47%. Tahun anggaran penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta yang kurang efektif adalah tahun anggaran 2003 karena efektivitasnya hanya mencapai angka 104,55% atau dengan kata lain hanya terdapat kelebihan target penerimaan Pajak Daerah sebesar 4,55%.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah penulis lakukan, maka dari hasil penghitungan yang sudah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta selama otonomi daerah sudah berjalan efektif karena efektivitasnya sudah mencapai angka minimal 100%, kecuali untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, di mana tidak semua tahun anggaran Penerimaan Pajak daerah mencapai angka minimal 100%.

Efektivitas penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berkisar antara 108,06% sampai dengan 157,27%, Kabupaten Sleman berkisar antara 108,37% sampai dengan 129,05%, Pemerintah Kota Yogyakarta berkisar antara 104,55% sampai dengan 128,47% Pemerintah Kabupaten Bantul berkisar antara 101,78% sampai dengan 127,57% dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkisar antara 98,65% sampai dengan 123,42%, dan.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian yang telah dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis hanya mengambil data untuk periode sejak dimulainya otonomi daerah yaitu tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2005.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta belum mempunyai Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengatur atau menentukan ukuran yang pasti mengenai batasan tingkat efektivitas, sehingga penulis hanya dapat menarik kesimpulan berdasarkan pendapat Halim (2004:285) yang mengatakan bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila efektivitas yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100%, namun demikian semakin tinggi efektivitas yang dicapai menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

C. Saran

Setelah melakukan pengolahan data penerimaan Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis mencoba memberikan saran yang mungkin diperlukan atau bermanfaat bagi Pemerintah Daerah maupun bagi peneliti selanjutnya, saran dan masukan yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta selama otonomi daerah tahun

anggaran 2001-2005 masih mengalami perubahan yang tidak konstan, bahkan secara umum cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya walaupun sudah mencapai angka lebih dari 100%, untuk hal ini hendaknya diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DIY bagaimana cara mempertahankan dan mencoba meningkatkan penerimaan Pajak Daerahnya. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, hendaknya lebih ditingkatkan lagi kinerjanya agar penerimaan Pajak Daerahnya bisa cenderung meningkat mencapai angka minimal 100% dengan cara memaksimalkan pemungutan atau penerimaan Pajak Daerah.

2. Untuk meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, hendaknya Pemerintah Daerah bisa mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan Pajak daerah dapat dicari dan didukung dengan cara memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan atau penerimaan Pajak Daerah.
3. Bagi para peneliti selanjutnya, sebaiknya penelitian dilakukan dalam rentang waktu yang lebih lama dan sampel yang digunakan dalam penelitian lebih berkembang dari penelitian sebelumnya, misalnya dengan sampel perbandingan antar Propinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi FE-UGM.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Candra, Nely Vianita. 2004. **Perkembangan Dan Prediksi Pendapatan Pajak Daerah Dilihat Dari Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**. Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Dewi, Dyah Hayu Susetya. 2004. **Analisis Perkembangan Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebelum Dan Selama Otonomi Khusus**. Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2004. Edisi Revisi. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Munir, Badrul. 2003. *Perencanaan Anggaran Kinerja*. Mataram. Samawa Center
- Nubi, Maria Agnes Kewa. 2003. **Analisis Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah, Prediksi Pendapatan Pajak Daerah**. Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Sanata Dharma (1998). Yogyakarta :
Universitas Sanata Dharma.

Prakosa, Kesit Bambang. 2005. Edisi Revisi. *Pajak dan Retribusi Daerah*.
Yogyakarta: UII Press (anggota IKAPI)

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.

Soeratno dan Suparmono. 2002. Urgensi Pajak Daerah dan Penghasilan Daerah
dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah Propinsi DIY. Edisi 7. *Jurnal
Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: UGM.

Suni, Yosepha Maria Septima. 2005. **Analisis Pajak Daerah Dalam Penerimaan
Daerah**. Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.

Triyono. 2002. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*
Volume 1 No. 2 September 2002.

-----, *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*
(online). [Http://www.ditjen-otda. Go. Id/otonomi/pilkada/UU No. 3204. pdf](http://www.ditjen-otda.Go.Id/otonomi/pilkada/UU%20No.3204.pdf)
(diakses tanggal 15 Mei 2006).

-----, *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* (online).
[http://www.ditjen-otda. Go. Id/otonomi/pilkada/UU No. 3304. pdf](http://www.ditjen-otda.Go.Id/otonomi/pilkada/UU%20No.3304.pdf) (diakses
tanggal 15 Mei 2006).

LAMPIRAN

Lampiran 1

DATA PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (A)	Target Penerimaan Pajak Daerah (B)	Lebih (Kurang) Dari Target
Tahun 2001	Rp16.013.541.342,60	Rp14.776.059.092,36	Rp 1.237.482.250,24
Tahun 2002	Rp21.374.480.252,58	Rp17.584.379.338,95	Rp 3.790.100.913,63
Tahun 2003	Rp24.907.210.488	Rp19.300.000.000	Rp 5.607.210.488
Tahun 2004	Rp30.715.060.955,07	Rp28.327.600.000	Rp 2.387.460.955,07
Tahun 2005	Rp41.141.393.271,38	Rp33.067.768.825	Rp 8.037.624.446,38

Sumber data:Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman.

Lampiran 2

DATA PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (A)	Target Penerimaan Pajak Daerah (B)	Lebih (Kurang) Dari Target
Tahun 2001	Rp 2.674.755.471	Rp 2.096.679.791	Rp 578.075.680
Tahun 2002	Rp 4.888.908.506	Rp 4.803.611.193	Rp 85.297.313
Tahun 2003	Rp 6.600.583.794	Rp 6.437.296.400	Rp 163.287.394
Tahun 2004	Rp 7.085.891.785	Rp 6.951.700.000	Rp 134.191.785
Tahun 2005	Rp 7.837.546.787	Rp 7.688.500.000	Rp 149.046.787

Sumber data:Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Bantul.

Lampiran 3

DATA PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (A)	Target Penerimaan Pajak Daerah (B)	Lebih (Kurang) Dari Target
Tahun 2001	Rp 901.975.302,20	Rp 845.504.000	Rp 56.471.302,20
Tahun 2002	Rp 1.396.710.526	Rp 1.261.038.916	Rp 135.671.610
Tahun 2003	Rp 2.067.035.684,83	Rp 1.674.824.600	Rp 392.211.084,83
Tahun 2004	Rp 2.325.069.244,30	Rp 2.144.780.000	Rp 180.289.244,30
Tahun 2005	Rp 2.488.959.377,51	Rp 2.523.000.000	(Rp 34.040.622,49)

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Kulon Progo.

Lampiran 4

DATA PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (A)	Target Penerimaan Pajak Daerah (B)	Lebih (Kurang) Dari Target
Tahun 2001	Rp 713.745.375	Rp 807.150.110,45	Rp 93.404.735,45
Tahun 2002	Rp 909.400.000	Rp 982.690.105,95	Rp 73.290.105,95
Tahun 2003	Rp 1.559.658.159	Rp 1.892.344.797,92	Rp 332.686.638,92
Tahun 2004	Rp 1.922.408.159	Rp 3.023.328.424	Rp 1.100.920.265
Tahun 2005	Rp 3.200.000.000	Rp 4.433.568.230,71	Rp 1.233.568.230,71

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Gunung Kidul.

Lampiran 5

DATA PENERIMAAN PAJAK DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (A)	Target Penerimaan Pajak Daerah (B)	Lebih (Kurang) Dari Target
Tahun 2001	Rp 22.886.374.632,50	Rp 17.814.447.520	Rp 5.071.927.112,50
Tahun 2002	Rp 30.519.661.523	Rp 27.107.396.233	Rp 3.412.265.290
Tahun 2003	Rp 33.526.514.267	Rp 32.068.358.000	Rp 1.458.156.267
Tahun 2004	Rp 40.581.980.256	Rp 38.149.900.000	Rp 2.432.080.256
Tahun 2005	Rp 46.106.723.372	Rp 43.365.000.000	Rp 2.741.723.372

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pemerintah Kota Yogyakarta.

Lampiran 6